

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Selasa, 16 Desember 2019



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia Halaman 7	Senin, 16 Desember 2019	Konstruksi Sengaja Tampak Bergelombang	Pimpinan Proyek Area 1 PT Jasamarga Jalan tol layang Cikampek (JJC) Prajudi mengatakan bahwa jalan tol layang tersebut dibuat tidak terlalu tinggi dari ruas tol eksisting atau mengambil clearance minimal yakni 5,1 meter.
2	Bisnis Indonesia Halaman 8	Senin, 16 Desember 2019	Batang Tawarkan TOD Seluas 157 Ha	Bupati Batang Wihaji menyampaikan pihaknya berencana mengembangkan Kawasan TOD seluas 157 ha pada 2020. Saat ini, sudah ada surat permintaan dari sekitar 4-5 perusahaan untuk membangun area terpadu tersebut.
3	Kompas Halaman 13	Senin, 16 Desember 2019	Tol Layang Tekan Kemacetan	Jalan tol layang yang membentang 38 kilometer itu hanya bisa dilintasi kendaraan golongan 1 nonbus atau mobil dengan tinggi tak lebih dari 2,3 meter. Masyarakat bisa memanfaatkannya secara gratis hingga pemerintah selesai menentukan tarif.
4	Bisnis Indonesia Halaman 23	Senin, 16 Desember 2019	BUMN Siap Garap Perumahan	Sejumlah Badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya masih menanti langkah selanjutnya yang akan disiapkan pemerintah terkait tawaran kerja sama pembangunan perumahan di ibu kota negara (IKN) yang baru.

Judul	Konstruksi Sengaja Tampak Bergelombang	Tanggal	Senin, 16 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 7		
Resume	Pimpinan Proyek Area 1 PT Jasamarga Jalan tol layang Cikampek (JJC) Prajudi mengatakan bahwa jalan tol layang tersebut dibuat tidak terlalu tinggi dari ruas tol eksisting atau mengambil clearance minimal yakni 5,1 meter.		

► TOL LAYANG JAPEK II

Konstruksi Sengaja Tampak Bergelombang

Bisnis, JAKARTA — Jika dilihat dari atas, jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II tampak bergelombang. Ternyata ‘gelombang’ tersebut dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi jalan di bawahnya.

Aprianus Doni Tolok
redaksi@bisnis.com

Pimpinan Proyek Area 1 PT Jasamarga Jalan tol layang Cikampek (JJC) Prajudi mengatakan bahwa jalan tol layang tersebut dibuat tidak

terlalu tinggi dari ruas tol eksisting atau mengambil clearance minimal yakni 5,1 meter.

“Waktu melewati jembatan, maka ditinggikan. Pokoknya jarak [clearance] harus 5,1 meter,” ujarnya setelah dibukanya jalan tol layang tersebut

untuk publik, Minggu (15/12) mulai pukul 06.00 WIB.

Prajudi menambahkan bahwa setelah diresmikan hingga menjelang dibuka untuk umum, jalan tol itu mendapat sentuhan terakhir pada sarana dan prasarana pendukung. “Kami menambahkan barrier di sejumlah titik, termasuk penambahan rambu-rambu,” imbuhnya.

Jalan tol layang tersebut hanya untuk kendaraan kecil atau Golongan I nonbus dan nontruk. Dengan demikian, di masing-masing ujung ruas 1 tol itu dipasang portal dengan ketinggian tertentu agar pengendara bisa mengetahui kendaraanya boleh melintas atau tidak.

Selain itu, ruas tol layang sepanjang 38 kilometer ini diharapkan dapat memecah kepadatan lalu lintas di ruas eksisting hingga 30%, terutama pada masa Natal dan Tahun Baru.

Corporate Communication & Community Development Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk. Dwimawan Heru mengatakan bahwa saat ini jalan tol layang ini belum bertarif atau dapat dilalui secara cuma-cuma.

Kendati jalan tol layang ini hanya

boleh dilalui kendaraan Golongan I, dari sisi kekuatan konstruksi tol layang ini didesain untuk dilalui semua golongan.

General Manager Traffic PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJLC) Aprimo menjelaskan bahwa alasan truk dan bus tidak diizinkan melintasi Tol Layang Japek II karena secara umum kecepatan jenis kendaraan tersebut di bawah standar yang ditetapkan yakni 60-80 kilometer per jam.

“Kendaraan besar jika mengalami gangguan juga pasti akan lebih lama penanganannya,” katanya. ■

Judul	Batang Tawarkan TOD Seluas 157 Ha	Tanggal	Senin, 16 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 8		
Resume	Bupati Batang Wihaji menyampaikan pihaknya berencana mengembangkan Kawasan TOD seluas 157 ha pada 2020. Saat ini, sudah ada surat permintaan dari sekitar 4-5 perusahaan untuk membangun area terpadu tersebut.		

► PENGEMBANGAN KAWASAN

Batang Tawarkan TOD Seluas 157 Ha

Bisnis, SEMARANG — Pemerintah Kabupaten Batang menawarkan pengembangan kawasan seluas 157 hektare sebagai *transit oriented development* (TOD) berbasis jalan tol di KM 360 Semarang—Batang. Proses pengembangan ditargetkan mulai pada tahun depan.

Hafiyyan
hafiyyan@bisnis.com

Bupati Batang Wihaji menyampaikan pihaknya berencana mengembangkan kawasan TOD seluas 157 ha pada 2020. Saat ini, sudah ada surat peminatan dari sekitar 4—5 perusahaan untuk membangun area terpadu tersebut.

Lahan untuk TOD nantinya merupakan milik PTPN IX, sehingga statusnya sudah jelas. Proses penandatanganan antara Pemkab Batang dan PTPN IX juga sudah dilakukan.

“Proses selanjutnya kami perlu mendapat izin dari pengelola jalan tol, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Surat sudah kami kirimkan ke Kementerian PUPR, sehingga insyaallah pembangunan TOD bisa dimulai pada 2020,” ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Pengembangan ini rencananya dilakukan oleh pihak swasta, baik penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN). Namun, sesuai arahan Kementerian BUMN, nantinya ada perusahaan perhotelan BUMN yang ingin ikut serta.

Dalam kawasan TOD seluas 157 ha, sebelumnya sudah dibangun zona peristirahatan (rest area) sebesar 7,6 ha yang mencakup 51 fasilitas. Rest area dengan fasilitas terlengkap yang mendapatkan rekor MURI itu dikelola oleh PT Jasamarga Rest Area Batang, yang terdiri dari PT Jasamarga Related Business (JMRB), PT PP (Persero)

► Sesuai arahan Kementerian BUMN, nantinya ada perusahaan perhotelan BUMN yang ingin ikut serta.

Tbk., PT PP Properti Tbk., dan PTPN.

Rest area tersebut selain memberikan berbagai kebutuhan fasilitas dasar juga memiliki arena taman bermain, klinik kesehatan, dan kebun binatang mini. Selain itu, terdapat pusat panganan dan kerajinan UMKM.

Adapun, pengembangan kawasan TOD secara keseluruhan akan mencakup hotel, arena pantai dan rekreasi air, wisata hutan edukasi, golf, akuarium besar biota laut, dan properti lainnya.

Harga tanah di sekitar TOD berkisar Rp800.000 per m²—Rp1 juta per m², sedangkan harga sewa tanah berkisar Rp5.000—Rp10.000 per m² per tahun.

Menurut Wihaji, keuntungan lain yang didapatkan investor dalam mengembangkan TOD yakni kemudahan perizinan dan kepastian lahan. Selain tol sebagai akses utama, infrastruktur lain yang mendukung adalah ketersediaan listrik, air bersih, dan koneksi internet seluruh *provider*.

PUSAT UMKM

Dalam *rest area* yang tergabung dalam TOD, sekitar 70% diperuntukkan bagi UMKM. Hal ini untuk memastikan agar pengembangan kawasan memberikan dampak positif



Sumber: Pemkab Batang
Bisnis/Amri Hidayat

Fasilitas:

1. Rest area dengan 51 fasilitas dan pusat UMKM.
2. Pengembangan area baru seperti hotel, pantai dan rekreasi air, wisata hutan edukasi, golf, akuarium biota laut

Keunggulan:

1. Dekat pantai dengan pemandangan indah
2. Fasilitas pintu keluar tol untuk kemudahan berbagai transportasi
3. Dekat dengan area rekreasi lainnya di Batang
4. Konsep Rest Area pertama yang tergabung dalam TOD di Indonesia

Tanah

1. Luas area 157 ha milik pemerintah
2. Harga tanah sekitar TOD Rp0,8 juta—Rp1 juta/ meter
3. Harga sewa tanah per tahun Rp5.000—Rp10.000/ meter

langsung bagi masyarakat.

Wihaji menjelaskan sejak beroperasinya tol Pemalang—Batang dan Batang—Semarang, sekitar 30.000 UMKM terdampak omzet penjualan yang menurun. Pasalnya, wilayah Batang sebagai area melintas tidak lagi dilirik oleh pengemudi.

“Biasanya titik lelah supir itu di

Batang, sehingga mereka istirahat.

Kini cuma melintas saja, numpang lewat. Mereka tidak lagi setop di Batang untuk makan atau belanja. Makanya saya ingin konsep rest area diubah, harus menjadi sebuah destinasi baru,” imbuhnya.

Dia pun mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo, agar UMKM

dilibatkan dalam pengoperasian tol. Dengan demikian, infrastruktur tersebut berdampak nyata bagi perekonomian masyarakat. Gayung pun bersambut, sehingga dibuatlah TOD berbasis tol.

Di sisi lain, pengoperasian jalan tol mendorong percepatan masuknya investasi ke Batang. Berdasarkan data Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng, per kuartal III/2019 Batang menyerap Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar US\$726,74 juta (Rp10,17 triliun), kedua terbesar setelah Jepara.

Selain itu, terdapat mega proyek PLTU Batang berdaya 2x1000 MW dengan nilai investasi US\$4,2 miliar. Proyek ini direncanakan beroperasi secara komersial atau *commercial operation date* (COD) pada akhir 2020.

“Pengembangan infrastruktur jalan dan energi mempercepat arus investasi ke Batang. Selain itu, kami hanya berjarak 17 km dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Jadi distribusi lebih cepat,” paparnya.

Selain TOD, sambung Wihaji, Batang juga memiliki 9 potensi investasi lainnya, seperti area terpadu belanja, hotel, dan pusat olah raga Batang Super Block (BSB); kawasan rekreasi dan hotel di Sigandu, serta sejumlah kawasan industri.

Ada juga rencana pengembangan Batang Wonderful Land, Clapar Eco Green Park, Bio Plantation Agriculture, perikanan dan gudang pendingin, properti dan pemukiman, serta area rekreasi di pegunungan.

Wihaji menjelaskan pemerintah tentunya berkomitmen memberikan pendampingan dan kejelasan dalam perizinan serta regulasi.

Selain itu, keunggulan Kabupaten Batang lainnya ialah harga lahan yang masih terjangkau dan upah tenaga kerja yang kompetitif dengan UMK yaitu Rp2 juta per bulan. ■

Judul	Tol Layang Tekan Kemacetan	Tanggal	Senin, 16 Desember 2019
Media	Kompas Halaman 13		
Resume	Jalan tol layang yang membentang 38 kilometer itu hanya bisa dilintasi kendaraan golongan 1 nonbus atau mobil dengan tinggi tak lebih dari 2,3 meter. Masyarakat bisa memanfaatkannya secara gratis hingga pemerintah selesai menentukan tarif.		

Tol Layang Tekan Kemacetan

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek II mulai dibuka untuk umum, Minggu (15/12/2019) pagi. Pengoperasian tol layang itu diyakini bisa mengurangi kemacetan di Tol Jakarta-Cikampek.

JAKARTA, KOMPAS — Jalan tol layang yang membentang 38 kilometer itu hanya bisa dilintasi kendaraan golongan I nonbus atau mobil dengan tinggi tak lebih dari 2,1 meter. Masyarakat bisa memanfaatkannya secara gratis hingga pemerintah selesai menentukan tarif.

General Manager Traffic PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJLC), anak usaha PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Aprimon, di Cikunir, Bekasi, Jawa Barat, mengatakan, jalan tol layang untuk sementara dioperasikan gratis. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat selama arus mudik dan arus balik Natal 2019 dan Tahun Baru 2020.

Penggunaan jalan tol layang juga dibatasi hanya untuk kendaraan golongan I nonbus guna memudahkan proses evakuasi

jika terjadi gangguan. Tol layang didesain untuk pengguna jarak jauh sehingga tidak ada gerbang untuk keluar atau masuk di tengah tol layang.

Di sepanjang jalan tol layang disiapkan delapan putaran darurat (*u-turn*) yang bisa dibuka sewaktu-waktu jika terjadi insiden. Ada pula empat titik kantong berhenti serta dua jalur keluar darurat yang dapat dipakai untuk evakuasi. Sebanyak 113 kamera pemantau (CCTV) dipasang di sepanjang tol.

Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek diharapkan dapat mengurangi kepadatan di Tol Jakarta-Cikampek hingga 40 persen. Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Jakarta-Cikampek sudah sangat padat. "Di ruas Cikunir hingga Karawang Barat, rasio volume kendaraan dibandingkan dengan kapasitas jalan sudah lebih dari satu. Jika ke-

macetan bisa dikurangi sampai 40 persen, rasionya bisa meningkat sampai 0,7," katanya.

Secara keseluruhan, setiap hari ada 200.000 kendaraan yang melintasi Tol Jakarta-Cikampek. Rasio volume terhadap kapasitas jalan tol yang dioperasikan sejak 1988 itu sudah melampaui batas tingkat pelayanan, yakni 0,8 atau sangat padat.

Selain membentang di ketinggian, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek juga sedikit berbeda dengan jalan tol lain karena memiliki lintasan yang cukup panjang, yakni 38 kilometer. "Kami imbau masyarakat pengguna untuk menyiapkan fisik, bahan bakar, dan perlengkapan lain," ujarnya.

Kunci penting untuk melintasi dengan aman di jalan tol itu adalah mematuhi ketentuan batas atas kecepatan, yakni 80

kilometer per jam, dan batas bawah kecepatan 60 kilometer per jam. Batas kecepatan itu ditentukan dengan mempertimbangkan tekanan angin saat mobil melintas di ketinggian.

Hadapi tantangan

Saat ini, industri jalan tol menghadapi tantangan, antara lain pemain jalan tol yang belum banyak serta sumber pembiayaan yang terbatas. Padahal, lima tahun ke depan, pemerintah menargetkan akan membangun 2.500 kilometer jalan tol baru dengan kebutuhan investasi Rp 375 triliun-Rp 425 triliun dan biaya pembebasan lahan sampai Rp 100 triliun.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol Danang Parikesit mengatakan, lingkungan bisnis tidak berkembang. Meski ada pemain baru, jumlahnya tidak besar. Soal pembiayaan, selama lima

tahun terakhir dana yang bisa disediakan bank-bank pemerintah untuk jalan tol rata-rata Rp 70 triliun per tahun.

Oleh karena itu, pemerintah berharap makin banyak swasta berinvestasi di jalan tol. Di sisi lain, pembangunan jalan tol erat dengan pengembangan kawasan. Badan usaha telah melihat bahwa berinvestasi membangun jalan tol lebih menguntungkan jika dibarengi pengembangan kawasan, seperti tecermin dari usulan PT Hutama Karya (Persero) untuk pengembangan kawasan ekonomi di sekitar tol Trans-Sumatera.

Namun, skema tersebut belum bisa dilakukan karena regulasi belum memungkinkannya. Pengelola tol dimungkinkan mendapat nilai tambah lain dengan mengembangkan tempat istirahat dan pelayanan.

(VAN/NAD)

Judul	BUMN Siap Garap Perumahan	Tanggal	Senin, 16 Desember 2019
Media	Bisnis Indonesia Halaman 23		
Resume	Sejumlah Badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya masih menanti langkah selanjutnya yang akan disiapkan pemerintah terkait tawaran kerja sama pembangunan perumahan di ibu kota negara (IKN) yang baru.		

► IBU KOTA NEGARA BARU

BUMN Siap Garap Perumahan

Bisnis, JAKARTA — Sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) beserta anak usahanya masih menanti langkah selanjutnya yang akan disiapkan pemerintah terkait tawaran kerja sama pembangunan perumahan di ibu kota negara (IKN) yang baru.

Dalam kajian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) total kebutuhan anggaran untuk mewujudkan rencana pemindahan IKN berkisar Rp466 triliun.

Sekitar 26,4% atau Rp123,2 triliun dari kebutuhan itu diharapkan bisa didanai dari swasta, termasuk BUMN, salah satunya dalam pembangunan perumahan umum.

Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung (anak usaha dari PT Wijaya Karya Persero Tbk.) Bobby Iman Setya menyatakan pihaknya tengah melihat peluang bisnis yang dapat dikembangkan di calon lokasi ibu kota baru. Saat ini, dia masih menunggu rampungnya proses kajian, penyusunan rencana induk dan payung hukum dari pemerintah.

“Pada 2020 sampai dengan 2021 sepertinya pemerintah masih melakukan proses kajian. Mungkin pada pertengahan 2021 kami akan lihat apa saja peluang bisnis yang bisa kami kerjakan,” ujarnya belum lama ini.

Bobby mengatakan proyek yang

bisa turut dikerjakan perusahaan itu salah satunya ialah pembangunan rumah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan TNI/Polri.

Direktur Utama PT Wika Realty Agung Salladin juga mengatakan rencana pemindahan ibu kota negara ke Provinsi Kalimantan Timur diprediksi bakal membawa pengaruh positif terhadap investasi di sektor properti.

Dia mengungkapkan Wika Realty selaku bagian dari Wika Group berkomitmen untuk mendukung program pemerintah dalam rencana pembangunan IKN yang baru.

“Meskipun demikian, dampaknya [keterlibatan dalam pembangunan IKN] tidak akan langsung dirasakan perusahaan, dan baru akan terasa sekitar dua sampai tiga tahun setelahnya,” ucapnya.

Direktur keuangan PT PP (Perseero) Tbk. Agus Purbianto menyatakan pihaknya siap bekerja sama dengan pemerintah untuk menjalankan pembangunan proyek IKN, termasuk untuk proyek perumahan.

JALIN KEMITRAAN

Dia menuturkan, PT PP melalui anak usahanya yang bergerak di bidang properti yaitu PT PP Properti Tbk. (PPRO) berencana akan menjalin kemitraan untuk pembangunan perumahan di calon lokasi ibu kota

yang baru.

“Untuk proyek di Kalimantan Timur itu sebenarnya polanya *partnership*, karena PP Properti akan bekerja sama dengan mitra untuk mengembangkan lahan yang luasnya diperkirakan mencapai 500 hektare,” ungkapnya.

Direktur Utama PP Properti Taufik Hidayat sebelumnya mengatakan lahan seluas 500 hektare itu rencananya akan dibangun menjadi properti dengan konsep *mixed use*.

Pihaknya belum dapat menjelaskan secara terperinci mengenai rencana pengembangan lahan tersebut, karena masih melakukan riset dan kajian di internal perusahaan.

Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Eko D. Heripoerwanto memastikan pemerintah akan melibatkan pengembang untuk kerja sama pembangunan perumahan.

Pemerintah, imbuhnya, akan memberikan insentif kepada pihak swasta dan pengembang yang ikut terlibat dalam proyek tersebut, tetapi dia belum dapat mengungkapkan insentif apa saja yang akan diberikan karena masih dalam proses kajian.

Eko menyatakan realisasi proyek perumahan di IKN masih menunggu terbitnya rencana induk serta payung hukum yang mengatur tentang IKN.

(Fitri Sartina Dewi)